



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BUDI PRAYITNO**
2. Jabatan : **KEPALA BIDANG KEPATUHAN INTERNAL, HUKUM, DAN INFORMASI**
3. NHK : **113388**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.040.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 54 m2/21 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 55 m2/21 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/27 m2 di KAB / KOTA PATI, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/27 m2 di KAB / KOTA PATI, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
6. Tanah dan Bangunan Seluas 130 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	92.000.000
1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000		
2. MOBIL, SUZUKI TM2FL / IGNIS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	84.800.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	263.997.363



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.480.797.363
III. HUTANG	Rp.	5.832.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.474.965.363

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.